

TESIS
EFEKTIVITAS PROGRAM *MAKASSAR TIDAK RANTASA*
UNTUK PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN
BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

*THE EFFECTIVENESS OF THE *MAKASSAR TIDAK RANTASA**
PROGRAM FOR WASTE MANAGEMENT IN BIRINGKANAYA
DISTRICT, MAKASSAR CITY

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SALEH
P022171204



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

**EFEKTIVITAS PROGRAM *MAKASSAR TIDAK RANTASA*
UNTUK PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN
BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD SALEH
P022171204

Kepada

**PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**EFEKTIVITAS PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA
UNTUK PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN
BIRINGKANA YA KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD SALEH
P022171204**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 14 Januari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng.
NIP. 196207271989031003

Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si.
NIP. 196604271991032002

Ketua Program Studi

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng.
NIP. 196207271989031003



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP. 196703081990031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saleh

Nomor Mahasiswa : P022171204

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya. Naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini terdapat unsur-unsur jiplakan tesis dan dapat dibuktikan, saya bersedia tesis ini dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Januari 2022

Mahasiswa



Muhammad Saleh

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada hentinya penulis mengucapkan dan menanamkan dalam hati puji syukur kehadiran Allah SWT rasa syukur atas segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Program *Makassar Tidak Rantasa* (MTR) untuk Penanganan Sampah di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”.

Maksud dan tujuan penulis menyusun tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Selain itu, tesis ini juga untuk memberikan informasi kepada pembaca gambaran efektivitas dari Program MTR dalam penanganan sampah di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang terbingkai dalam analisis penelitian karya tulis ini.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana berkat do’a, cinta, serta dukungannya yang tidak pernah berakhir sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan karya tulis ini. Selesaiannya karya tulis ini juga tidak luput dari bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi serta kerjasama oleh berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

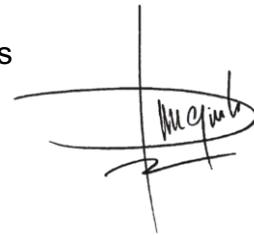
1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng. selaku ketua pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
2. Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si. selaku sekretaris pembimbing. Terima kasih atas arahan, waktu, motivasi, serta dorongan yang diberikan kepada penulis.
3. Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS., Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, MS., dan Dr. Muh. Hatta Jamil, S.P., M.Si. selaku tim penguji. Terima kasih atas masukan, kritikan dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis.
4. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
5. Segenap dosen program studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberi banyak ilmu kepada penulis yang tentu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya.
6. Segenap staf Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam pengurusan administrasi selama masa studi.
7. Keluarga besar penulis yang telah banyak mendukung penulisan tugas akhir ini, terkhusus saudara dan saudari penulis.
8. Rekan angkatan Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah 2017, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama masa studi, terkhusus kelas Manajemen Perencanaan.

9. Rekan angkatan Magister Manajemen 2016, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini, terkhusus kelas M.M-1.

Kalimat tidak akan cukup untuk membalas segala bantuan dan kontribusi mereka. Semoga kebaikan dan bantuan tersebut dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah SWT, bernilai ibadah di mata Allah SWT, dan dilindungi di dunia serta di akhirat kelak Oleh Allah SWT. Dengan demikian semoga karya tulis ini bermanfaat dan memberikan sumbangsi untuk perkembangan ilmu dan pengetahuan.

Makassar, 14 Januari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Saleh', written over a vertical line that extends from the date above.

Muhammad Saleh

ABSTRAK

MUHAMMAD SALEH, *Efektivitas Program Makassar Tidak Rantasa untuk Penanganan Sampah di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar* (dibimbing oleh **Ahmad Munir** dan **Rahmadanih**).

Permasalahan sosial dan juga lingkungan merupakan permasalahan yang lahir di tengah masyarakat, salah satunya yaitu sampah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di setiap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis efektivitas operasional Program *Makassar Tidak Rantasa* (MTR) dalam penanganan sampah, (2) menganalisis efektivitas peran serta masyarakat dalam mendukung Program MTR dalam penanganan sampah di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dan dilakukan di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Penentuan sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan sistem *non-probability sampling*. Data dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MTR untuk penanganan sampah di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan aspek operasional dari pewadahan kurang efektif, pengumpulan kurang efektif, dan pemindahan atau pengangkutan kurang efektif, serta aspek peran serta masyarakat kurang efektif. Pemerintah perlu membangun arahan lanjutan terkait dengan pelaksanaan program tersebut sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui aksi nyata yang bertujuan untuk menjaga dan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman sangat diperlukan untuk mewujudkan visi Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua.

Kata kunci: efektivitas, program MTR, penanganan sampah

ABSTRACT

MUHAMMAD SALEH, *The Effectiveness of the Makassar Tidak Rantasa Program for Waste Management in Biringkanaya District, Makassar City* (supervised by **Ahmad Munir** and **Rahmadanih**).

Social and environmental dynamics are essential problems that arise in the community, one of which is waste generated by community daily activities. This study aims to (1) analyze the operational effectiveness of the *Makassar Tidak Rantasa* Program (MTR) in waste management, (2) analyze the effectiveness of community participation within Biringkanaya District, Makassar City in supporting the MTR Program in waste management. This study is descriptive quantitative and was conducted in Biringkanaya District, Makassar City. Data were collected using survey method by questionnaire distribution. Samples were determined using the *Slovin* formula with a *non-probability* sampling system. Data were analyzed with descriptive statistics. This study reveals that the MTR Program was ineffective for waste management in Biringkanaya District, Makassar City. Based on the results of this study, the operational aspects of the container, the waste collection, and the waste transfer were ineffective. Along with the operational aspects, community participation was also ineffective. This study suggests that the government should impose further directions related to the implementation of the program as an effort to create a healthier and more comfortable environment. Public awareness and concern for the environment through concrete actions aimed at creating and maintaining a healthy and comfortable environment is necessary to realize Makassar's vision of becoming the world-class city that is comfortable for all.

Keywords: effectiveness, MTR program, waste management

DAFTAR ISI

	Teks	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Pengertian Efektivitas	10
B. Definisi Sampah	14
C. Jenis dan Sumber Sampah	17
D. Aspek Pengelolaan Sampah	19
E. Pengelolaan Sampah Prinsip 3R	27
F. Program <i>Makassar Tidak Rantasa</i> (MTR)	31
G. Penelitian Terdahulu	32
H. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN		
A. Jenis Penelitian	35

B. Lokasi Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Populasi dan Sampel	38
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Instrumen Penelitian	40
G. Teknik Analisis Data	41
H. Definisi Operasional	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	52
C. Pembahasan	67
1. Tingkat Efektivitas Aspek Operasional	72
2. Tingkat Efektivitas Aspek Peran Serta Masyarakat	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir Penelitian	34
2.	Peta Kecamatan Biringkanaya	37

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Interval Skala <i>Likert</i>	43
2.	Interval Indikator Efektivitas	45
3.	Definisi Operasionalisasi	46
4.	Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Makassar	49
5.	Jumlah Penduduk Kota Makassar	50
6.	Luas Wilayah Menurut Kelurahan	51
7.	Distribusi Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
8.	Distribusi Reponden Berdasarkan Usia	54
9.	Distribusi Reponden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
10.	Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	56
11.	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	57
12.	Hasil Olah Data Variabel Aspek Operasional	58
13.	Hasil Olah Data Variabel Aspek Peran Serta Masyarakat	64
14.	Tingkat Efektivitas	67

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Dokumentasi Survei Lapangan	90
2.	Kuesioner Penelitian	96
3.	Data Skor Hasil Kuesioner	98
4.	Data Frekuensi Jawaban Responden	103
5.	Skor Penilaian Efektivitas	103
6.	Data Responden	105
7.	Frekuensi Pilihan Responden	106
8.	Hasil Uji Statistik Kuesioner	108
9.	Hasil Uji Validitas	109
10.	Hasil Uji Reliabilitas	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan mengelola daerah adalah sebuah agenda penting dalam menyusun dan mendukung perkembangan pembangunan nasional. Usaha pengelolaan daerah secara maksimal adalah bentuk pelayanan yang berdampak pada kelayakan hidup secara nasional maupun daerah. Berdasarkan tujuan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hakikat pembangunan nasional adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum serta meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional (Bappenas, 2009).

Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi sebuah ancaman yang memberikan dampak negatif apabila kesiapan daerah dalam mengelola laju pertumbuhan dan juga tata kelola wilayah yang tidak terencana dengan baik. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong lahirnya berbagai persoalan baru yang berdampak pada kehidupan sosial. Indonesia menjadi sebuah negara dengan jumlah penduduk ke empat terbanyak di dunia saat ini dengan jumlah penduduk kurang lebih 270.203.917 jiwa berdasarkan data hasil sensus penduduk 2020 yang tersebar di 34 provinsi yang ada. Tentu hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus sebab laju pertumbuhan

penduduk akan berbanding lurus dengan permasalahan sosial yang muncul.

Permasalahan sosial dan juga lingkungan adalah permasalahan yang lahir di tengah masyarakat yang menjadikan kegiatan hidup sosial terganggu dan tidak kondusif. Salah satu permasalahan sosial dan lingkungan adalah sampah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di setiap lingkungan. Upaya-upaya pemerintah dalam menangani permasalahan sampah ini harus dapat dimaksimalkan, mengingat pentingnya permasalahan lingkungan ini.

Indonesia memproduksi sampah sekitar 65 juta ton setiap tahunnya dan sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak tertangani berdasarkan data riset yang diungkapkan oleh *Sustainable Waste Indonesia*. Sebanyak 69 persen sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sebanyak 24 persen sampah tidak dikelola dengan baik, sedangkan 7 persen lainnya sampah didaur ulang. Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan yaitu 60 persen sampah organik, 14 persen sampah plastik, 9 persen sampah kertas, 4,3 persen sampah logam, serta 12,7 persen sampah kaca, kayu, dan bahan lainnya (litbang.kemendagri.go.id, 2018).

Data beberapa kota besar di Indonesia berdasarkan publikasi data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 dapat menjadi rujukan yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap harinya diperkirakan memproduksi sampah sebesar 8.352 ton, Kota Surabaya

2.222 ton, Kota Medan 1.704 ton, Kota Bandung 1.628 ton, Kota Tangerang 1.623 ton, Kota Semarang 1.276 ton, dan Kota Makassar sebanyak 996 ton per hari. Rata-rata capaian sampah yang terangkut hanya sebanyak 70,4 persen dari total produksi sampah setiap harinya di 34 ibu kota provinsi. Produksi sampah yang tinggi ternyata tidak diimbangi dengan jumlah sampah yang terangkut. Jumlah tersebut tentu membutuhkan upaya yang besar dalam penanganannya.

Muhdar dalam Malina dkk (2017) menuliskan bahwa masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah kota adalah masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan. Sebagian besar kota di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan membuang sampahnya sekitar 60 persen dari seluruh produksi sampahnya sebagai akibat dari biaya operasional yang cukup tinggi. Sebagian besar sampahnya ditangani dan dibuang dengan cara yang tidak saniter dan mencemari dari 60 persen tersebut. Pemerintah telah melakukan beragam upaya untuk mengurangi timbulan sampah dan salah satunya dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup melalui Permen No. 13 Tahun 2012 tentang penanganan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) diharapkan menjadi sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan sampah tersebut.

Kota Makassar menjadi sebuah kota dengan konsep kota dunia memiliki potensi pertumbuhan penduduk yang cukup maksimal. Tidak

hanya melihat angka kelahiran saja, namun proses urbanisasi yang terjadi juga menjadi aspek yang berdampak langsung dalam peningkatan jumlah penduduk di Kota Makassar, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kota Makassar mencapai 1.526.677 jiwa dengan pertumbuhan sekitar 1,23 persen. Sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Kota Makassar dihadapkan dengan permasalahan lingkungan dalam pengelolaan sampah sisa-sisa aktivitas masyarakat. Pengelolaan sampah adalah sebuah bentuk kerja nyata dalam mewujudkan slogan Makassar kota dunia.

Kota Makassar sendiri memiliki sebuah program yang diharapkan berdampak langsung dan juga menjadi solusi yang efektif untuk penanganan sampah. Program *Makassar Tidak Rantasa* (MTR) merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kebersihan kota yang dimulai dari kesadaran semua warga Kota Makassar untuk mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Kontainer sampah yang ada di ruang kota tidak akan digunakan, kontainer sampah atau tempat pembuangan sementara (TPS) akan digantikan dengan sistem pengangkutan langsung dari rumah ke rumah. Sampah akan diangkut armada kebersihan dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Program MTR yang digagas oleh Walikota Makassar Ir. Ramdhan Pomanto pada tahun 2014 merupakan konsep pengelolaan sampah yang bertujuan memberi solusi terhadap permasalahan sampah yang ada di Kota Makassar. Program MTR menjadi program unggulan yang dirasa memberi

manfaat besar bagi masyarakat dengan menyediakan beberapa fasilitas untuk memudahkan sampah teratasi, baik sampah rumahan maupun sampah individu.

Di awal program tersebut, terdapat berbagai fasilitas dan juga sarana yang disediakan untuk mengatasi permasalahan sampah dengan menyediakan mobil pengangkut sampah sebanyak 44 unit armada yang dikenal dengan truk Tangkasaki, 48 unit armada *arm roll*, 163 kontainer serta 150 unit armada khusus dari dinas Pertamanan dan Kebersihan. Tidak hanya fasilitas berupa kendaraan fisik, Program MTR juga memiliki konsep dengan menjemput langsung sampah ke setiap wilayah masyarakat, dari sektor kelurahan hingga sektor tingkat rukun warga (RW). Hal ini tentu saja memberikan gambaran terkait bagaimana pengelolaan sampah dengan konsep efektivitas yang diharapkan.

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan di Kota Makassar dengan jumlah penduduk terbanyak dari setiap kecamatan yang ada, data BPS tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 220.456 jiwa. Cakupan wilayah yang cukup luas juga menjadi sebuah permasalahan yang dapat menghambat penanganan kebersihan di wilayah tersebut. Tentu luas wilayah dan juga jumlah penduduk akan mempengaruhi model pengelolaan sampah serta fasilitas yang akan digunakan sehingga pelayanan sampah tersebut menjadi teratasi. Beberapa waktu terakhir, kondisi pemerintahan daerah di Kota Makassar sempat mengalami masa kekosongan pimpinan dengan menempatkan Pejabat Sementara yang

menjadi nahkoda Kota Makassar. Hal ini tentu secara tidak langsung memberikan dampak yang berbeda kepada setiap kebijakan yang ada dalam unsur pemerintahan dan juga penanganan pelayanan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tuangkan dalam tesis yang berjudul *“Efektivitas Program Makassar Tidak Rantasa untuk Penanganan Sampah di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”*.

B. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan arah dan sejauh mana penelitian ini membahas terkait efektivitas Program MTR dalam penanganan sampah di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Dalam penelitian ini tidak melihat secara komprehensif dari manajemen kinerja Program MTR, fokus pengukuran efektivitas adalah dengan melihat dua aspek sebagai variabel pengukuran yakni aspek Operasional dan juga aspek Peran Serta Masyarakat. Pengukuran masing-masing dilihat dari sudut pandang masyarakat dalam pengaplikasian dan juga kontribusi setiap masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas operasional Program MTR di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?
2. Bagaimana efektivitas peran serta masyarakat di Kecamatan Biringkanaya dalam mendukung pelaksanaan Program MTR untuk penanganan sampah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas operasional Program MTR dalam penanganan sampah di Kecamatan Biringkanaya.
2. Untuk menganalisis efektivitas peran serta masyarakat dalam mendukung Program MTR dalam penanganan sampah di Kecamatan Biringkanaya.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sisi ilmu pengetahuan, sebagai sebuah referensi tambahan dalam menyusun dan mengelola program penanganan sampah di perkotaan.
2. Sisi masyarakat, menjadi sebuah masukan agar mampu menciptakan perilaku sadar diri akan keterlibatan penanganan sampah di perkotaan.

3. Sisi pemerintahan, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan kontrol dan evaluasi terpadu pengelolaan sampah di Kota Makassar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan tesis ini disusun berdasarkan urutan yang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang teori dan konsep efektivitas, pengertian sampah, jenis dan sumber sampah, aspek pengelolaan sampah, pengelolaan sampah prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), Program *Makassar Tidak Rantasa* (MTR), penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tesis ini berisikan tentang: jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan kebutuhan data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam tesis ini berisikan tentang: gambaran umum Kota Makassar dan Kecamatan Biringkanaya, hasil penelitian dan pembahasan dari aspek operasional dan aspek peran serta masyarakat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari kata bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil atau berhasil menyelesaikan. Efektivitas adalah efek mencapai tujuan yang disepakati untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Tingkat tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat efektivitas. Pencapaian tujuan dan sasaran ini akan tergantung pada tingkat pengorbanan (Gibson *et al.*, 2002). Gibson juga menyampaikan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan, yaitu:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas yang didasarkan pada pandangan pribadi yang menekankan pada pekerjaan karyawan atau anggota organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Ada pandangan bahwa sebenarnya individu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Oleh karena itu, efektivitas tim adalah jumlah kontribusi semua anggota organisasi.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi mencakup efektivitas individu dan efektivitas kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi dapat memperoleh pekerjaan yang lebih banyak dari pada jumlah pekerjaan di setiap

seksi. Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan.

Siagian dalam Tanro (2016) mengemukakan bahwa konsep efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Konsep tersebut diharapkan juga dapat diterapkan pada penanganan sampah di Kota Makassar dengan pendekatan *Makassar Tidak Rantasa*.

Efektivitas didefinisikan sebagai secara sadar menggunakan sejumlah sumber daya, sarana dan prasarana untuk menghasilkan berbagai barang atau jasa untuk kegiatannya. Efektivitas menunjukkan apakah tujuan tercapai. Jika hasil dari kegiatan tersebut mendekati tujuan maka keefektifannya akan semakin tinggi (Siagian, 2002). Efektivitas juga dapat dijelaskan sebagai penggunaan sejumlah sumber daya, sarana dan prasarana, yang secara sadar ditentukan sebelumnya dan dapat menghasilkan banyak pekerjaan tepat waktu.

Menurut Permendagri No. 59 tahun 2007, hasil yang direncanakan dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan antara keluaran dengan hasil. Sedangkan efektivitas pada tingkat pencapaian hasil, atau secara sederhana dapat dijelaskan

sebagai efektivitas pemerintah daerah berarti tujuan pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai bagaimana organisasi mengelola untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan operasional. Efektivitas terkait dengan pelaksanaan semua tugas utama untuk mencapai tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi anggota.

Mardiasmo yang dikutip oleh Alisman (2014) mengemukakan bahwa efektivitas adalah keadaan mencapai tujuan yang diharapkan atau diinginkan dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi adalah ketika mencapai tujuannya maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah beroperasi secara efektif.

Dari beberapa sudut pandang di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu pada pencapaian yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah diatur, hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat menyatakan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur tercapai tidaknya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Handyaningrat, 2006).

Efektivitas suatu organisasi relatif mudah diukur, karena efektivitas bisa dilihat dari semua sudut, tergantung siapa yang menilainya. Jika dilihat dari sudut produktivitas dalam proses produksi kemudian manajer produksi akan mengatakan efektivitas seperti itu dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas barang/jasa yang diproduksi.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan perbandingan pencapaian dengan tujuan termasuk yang ditetapkan sebelumnya. Namun, jika tindakan yang diambil dalam proses pencapaian tujuan tidak tepat, tujuan tidak akan tercapai dan tujuan menjadi tidak valid. Standar atau ukuran untuk mencapai tujuan yang efektif atau tidaknya, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, hal ini agar karyawan dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dan tujuan organisasi akan dapat dicapai ketika melakukan tugas.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, seperti yang kita ketahui bersama, strategi merupakan jalur yang diikuti dengan berbagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga pelaksana tidak akan tersesat dalam proses pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang wajar terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang ditentukan berarti bahwa kebijakan harus dapat menghubungkan tujuan tersebut dengan pelaksanaan bisnis.
4. Perencanaan yang matang sebenarnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat, berarti membuat rencana yang tepat dalam rencana implementasi yang tepat masih diperlukan perencanaan yang baik, karena jika tidak maka pelaksana akan kekurangan pedoman untuk bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Memiliki fasilitas dan infrastruktur yang dapat disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, jika suatu rencana tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, sebaik apapun rencana tersebut, organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya, karena dengan organisasi yang melaksanakannya akan semakin dekat dengan tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka keefektifan organisasi memerlukan adanya suatu sistem pengawasan dan pengendalian (Siagian, 2002).

B. Definisi Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besibesi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai.

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna dan harus dikelola agar tidak

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota (Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-19-2454-2002).

Hadiwiyoto dalam Tanro (2016) memberikan batasan definisi sampah yakni: sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.

Soemirat (2009) menyatakan bahwa beberapa faktor penting yang mempengaruhi jumlah produksi sampah antara lain:

1. Jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula sampahnya. Pengelolaan sampah ini pun berpacu dengan laju pertambahan jumlah penduduk.
2. Keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang tiap harinya. Kualitas sampahnya pun semakin banyak yang bersifat non organik atau tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku, serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Peningkatan kesejahteraan akan meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan terhadap bangunan-bangunan, penambahan

transportasi dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.

3. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, menyebutkan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu di lakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006).

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4, 2011).

Berdasarkan asumsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sampah adalah hasil aktivitas manusia yang tak memiliki nilai dan masa kegunaan

atau bahan buangan yang dihasilkan baik dalam bentuk padat dan juga setengah padat yang bersifat zat organik dan anorganik.

C. Jenis dan Sumber Sampah

Klasifikasi sampah dan sumbernya sangat diperlukan dalam perencanaan sistem pengelolaan kebersihan, khususnya dalam sistem teknis operasional terkait pengelolaan dan juga buangan akhir sampah. Dari pedoman teknik pengelolaan persampahan Direktorat Jendral Cipta Karya, Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman, membagi klasifikasi sampah sebagai berikut:

1. Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik dan tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Contohnya daun-daun, kayu, kertas, tulang, sisa makanan, sayuran dan buah-buahan.
2. Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mengandung senyawa organik, umumnya sampah ini sangat sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya kaca, kaleng aluminium, debu, logam.

Jenis dan sumber sampah menurut Widyatmoko dan Moerdjoko (2012) dapat dikelompokkan menjadi:

1. Sampah rumah tangga yang terdiri dari:
 - a. Sampah basah yaitu sampah yang terdiri bahan-bahan organik yang mudah membusuk yang sebagian besar adalah sisa makanan, potongan hewan, sayuran dan lain-lain.

- b. Sampah kering yaitu sampah yang terdiri dari logam seperti besi, kaleng bekas dan sampah kering yang non logam misalnya.
 - c. Sampah lembut, yaitu sampah debu yang berasal dari penyapuan lantai, penggergajian kayu dan abu dari sisa pembakaran kayu.
 - d. Sampah besar, yaitu sampah yang terdiri dari buangan rumah tangga yang besar-besar seperti meja, kursi dan lain-lain.
2. Sampah komersial, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan komersial seperti pasar, pertokoan, rumah makan, tempat hiburan, penginapan dan lain-lain.
 3. Sampah bangunan, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan termasuk pemugaran dan pembongkaran suatu bangunan seperti semen, kayu, batu bata dan sebagainya.
 4. Sampah fasilitas umum, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan pembersihan dan penyapuan jalan, trotoar, taman, lapangan, tempat rekreasi dan fasilitas umum lainnya.

Klasifikasi Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang No.18

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu:

1. Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan

komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

3. Sampah Spesifik

Sampah spesifik meliputi: sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

D. Aspek Pengelolaan Sampah

Sistem pengolahan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diatur dalam SNI-19-2454-2002, UU Nomor 18 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011. Kelima aspek tersebut meliputi:

1. Aspek Teknis Operasional

Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, serta pengelolaan sampah di TPA. Tata cara pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang

berkesinambungan yaitu: pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.

- a. **Pewadahan Sampah.** Proses awal dalam pewadahan sampah terkait langsung dengan sumber sampah. Pewadahan sampah adalah aktivitas menampung sampah sementara baik permanen maupun non permanen dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah sesuai dengan pengelompokan pengelolaan sampah. Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standar Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis, mudah diperoleh dibuat oleh masyarakat serta mudah dikosongkan.
- b. **Pengumpulan Sampah.** Pengumpulan sampah yaitu aktivitas penanganan yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual dan atau dari wadah komunal (bersama) melainkan juga mengangkutnya ke tempat terminal tertentu, baik dengan pengangkutan langsung maupun tidak langsung. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu:
 - 1) **Pola Individual.** Pola individual langsung adalah kegiatan pengambilan sampah dari rumah-rumah sumber sampah dan diangkut langsung ke TPA tanpa melalui kegiatan pemindahan. Pola individual tidak langsung adalah kegiatan pengambilan

sampah dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan untuk kemudian diangkut ke TPA.

- 2) Pola Komunal. Pola komunal langsung adalah kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing titik komunal dan diangkut ke lokasi pembuangan akhir. Pola komunal tidak langsung adalah kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing titik pewadahan ke lokasi pemindahan untuk diangkut selanjutnya ke TPA.
- c. Pemindahan Sampah. Proses pemindahan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke TPA. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut dan atau ram, dan atau kantor bengkel.
- d. Pengangkutan Sampah. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke TPA. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truk *container* tertentu yang dilengkapi alat pengepres.
- e. Pengolahan Sampah. Pengolahan sampah adalah suatu proses untuk mengurangi volume/sampah dan atau mengubah bentuk sampah menjadi yang bermanfaat antara lain dengan cara

pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendauran ulangan.

f. Pembuangan Akhir Sampah. Pembuangan akhir sampah adalah tempat dimana dilakukan kegiatan untuk mengisolasi sampah sehingga aman bagi lingkungan. Teknik operasional pengelolaan sampah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) metode yaitu:

- 1) *Open Dumping*, Metode *open dumping* merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/menimbun di suatu tempat tanpa ada perlakuan khusus atau sistem pengolahan yang benar, sehingga sistem open dumping menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.
- 2) *Sanitary Landfill*. Metode pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan lapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.
- 3) *Controlled Landfill*, Metode *controlled landfill* adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

2. Aspek Kelembagaan

Organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat. Perancangan dan pemilihan organisasi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang ditetapkan, kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani (Rahardyan dan Widagdo, 2005). Menurut Syafruddin dan Priyambada (2001), bentuk kelembagaan pengelola sampah disesuaikan dengan kategori wilayah. Adapun bentuk kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kota Raya dan Kota Besar dengan jumlah penduduk > 500.000 jiwa. Bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri.
- b. Kota Sedang 1 dengan jumlah penduduk 250.000 - 500.000 jiwa atau ibu kota provinsi. Bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri.
- c. Kota Sedang 2 dengan jumlah penduduk 100.000 - 250.000 jiwa atau kota administratif. Bentuk lembaga yang dianjurkan berupa dinas/suku dinas/UPTD Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.
- d. Kota Kecil jumlah penduduk 20.000 - 100.000 jiwa atau kota administratif. Bentuk lembaga pengelolaan sampah yang

dianjurkan berupa dinas/suku dinas/UPTD Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.

3. Aspek Hukum dan Peraturan

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berpaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi serta keterlibatan masyarakat. Dasar hukum pengelolaan kebersihan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah.

4. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengolahan persampahan di Indonesia lebih diarahkan ke sistem pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah. Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional, dana pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas, kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri dan penyusunan tarif retribusi tidak didasarkan metode yang benar. Menurut Rahardyan dan Widagdo (2005), peraturan yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan

sampah di perkotaan dan pedesaan antara lain adalah mengatur tentang:

- a. Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan persampahan.
- b. Rencana induk pengelolaan sampah kota.
- c. Bentuk lembaga organisasi pengelolaan.
- d. Tata cara penyelenggaraan pengelolaan.
- e. Tarif jasa pelayanan atau retribusi.
- f. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta.

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Pada hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung

pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya (Soekanto, 2013).

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta perkembangan kota yang cukup pesat mengisyaratkan perlunya antisipasi pengelolaan persampahan yang lebih baik. Peran masyarakat merupakan elemen penting dalam hal ini. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat, semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia.

Pada umumnya masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang dihasilkannya. Bentuk peran serta masyarakat dalam mengelola sampah dapat dilihat berdasarkan karakteristik,

kesempatan, kemampuan dan kondisi eksisting yang ada. Peran serta masyarakat dikelompokkan menjadi dua (Kristiyanto, 2007), yaitu:

- a. Peran serta pasif yaitu; 1. Peduli terhadap kebersihan lingkungan; 2. Kewajiban membayar retribusi kebersihan, karena pengelolaan sampah memerlukan biaya.
- b. Peran serta aktif; 1. Mengumpulkan sampah secara komunal baik secara langsung maupun tidak; 2. Memberi nasehat/penyuluhan kepada masyarakat jangan membuang sampah sembarangan; 3. Melakukan kegiatan gotong royong; 4. Ikut menyediakan sarana kebersihan seperti tempat sampah.

Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar, merata, dan merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik.

E. Pengelolaan Sampah Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas

keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Menurut Hadiwiyoto (1983) definisi pengelolaan sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan dalam hubungannya dengan sampah dan diperhatikan beberapa tahapan yaitu pengumpulan, pemisahan, pembakaran dan pembuangan (penimbunan) sampah".

Menurut Sejati (2009) Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Diantaranya kegiatan pengelolaan sampah meliputi penanganan di tempat, pengumpulan sampah, transfer dan transport dan pengolahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka perlu suatu pengelolaan sampah dengan maksimal. Adapun upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang.

Sesuai dengan Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, dipertukan suatu perubahan paradigma yang lebih mengedepankan proses

pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yaitu dengan melakukan upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah sebelum akhirnya sampah dibuang ke TPA.

1. Prinsip *reduce* atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah. Namun diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut.
2. Prinsip *reuse* berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu refill dan lain-lain.
3. Prinsip *recycle* berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dsb atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan

kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah dan lain-lain.

Konsep di atas telah menjadi strategi nasional pembangunan berkelanjutan di bidang persampahan dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai berikut:

1. Harus tersedia institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah perkotaan.
2. Tersedia peraturan hukum di tingkat pusat dan daerah yang mengatur ketertiban pemerintah, masyarakat sektor informal dan swasta/pengusaha dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
3. Perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan yang diharapkan tersedia dari swadaya masyarakat.
4. Para pengelola sampah mulai dari tingkat sumber sampah sampai skala lingkungan menjalankan prinsip 3R.
5. Harus ada pemilahan sampah yang dapat dilaksanakan mulai sumber sampah dan lokasi pemindahan.
6. Harus ada penyuluhan dan kampanye nasional mengenai penanganan sampah dengan metode 3R.

Ada dua hal yang penting dalam konsep pengelolaan sampah yaitu partisipasi masyarakat dan pengelolaan sampah mendekati rumah tangga. Dengan demikian sampah yang akan terangkut menuju TPA akan menjadi berkurang sampai dengan tidak ada sama sekali, atau sering dikenal dengan istilah *zero waste*. Salah satu pendekatan pengelolaan sampah 3R

dan mendekati sumbernya adalah pengelolaan sampah kawasan dengan TPS pengolah. Sarana dan prasarana TPS pengolah ini untuk mewujudkan konsep 3R sehingga sampah yang terangkut ke TPA berkurang atau tidak ada sama sekali.

F. Program Makassar Tidak Rantasa (MTR)

Program *Makassar Tidak Rantasa* merupakan bagian dari visi dan misi Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto pada April 2014 yang ingin menjadikan Kota Makassar sebagai kota yang nyaman ditempati yang jauh dari sampah. Pemerintah Kota Makassar menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif untuk bersama melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing guna mewujudkan *Makassar Tidak Rantasa*.

Program MTR merupakan suatu gerakan yang mengedepankan aspek kebersihan, keindahan dan kenyamanan, tidak hanya faktor kebersihan gerakan tersebut juga diharapkan mengubah sikap dan perilaku masyarakat mengenai pentingnya hidup bersih bebas dari sampah serta menegakkan budaya *siri'* atau rasa malu sebagai warga Kota Makassar yang tidak *rantasa'* atau dengan kata lain warga yang tidak jorok.

Makassar Tidak Rantasa merupakan gerakan yang mengatur tentang tata kebersihan kota dimulai dari kesadaran semua warga kota Makassar untuk mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai formulasi pun dicoba untuk menyukseskan Program MTR, mulai

dari menggelar kegiatan kerja bakti massal atau jumat bersih, kerja bakti bersama TNI-Polri mengeruk kanal, sampah tukar beras, serta aku dan sekolahku tidak rantasa.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 bahwa pelaksanaan Program MTR didukung oleh Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan langkah teknis pelaksanaan Program MTR yaitu melaksanakan kerja bakti di setiap kelurahan, mengumpulkan sampah, membawa sampah ke TPS, membungkus sampah pada kantong, menempatkan sampah pada tempat sampah, memisahkan sampah basah dan sampah kering, menanggapi pelayanan pemerintah.

G. Penelitian Terdahulu

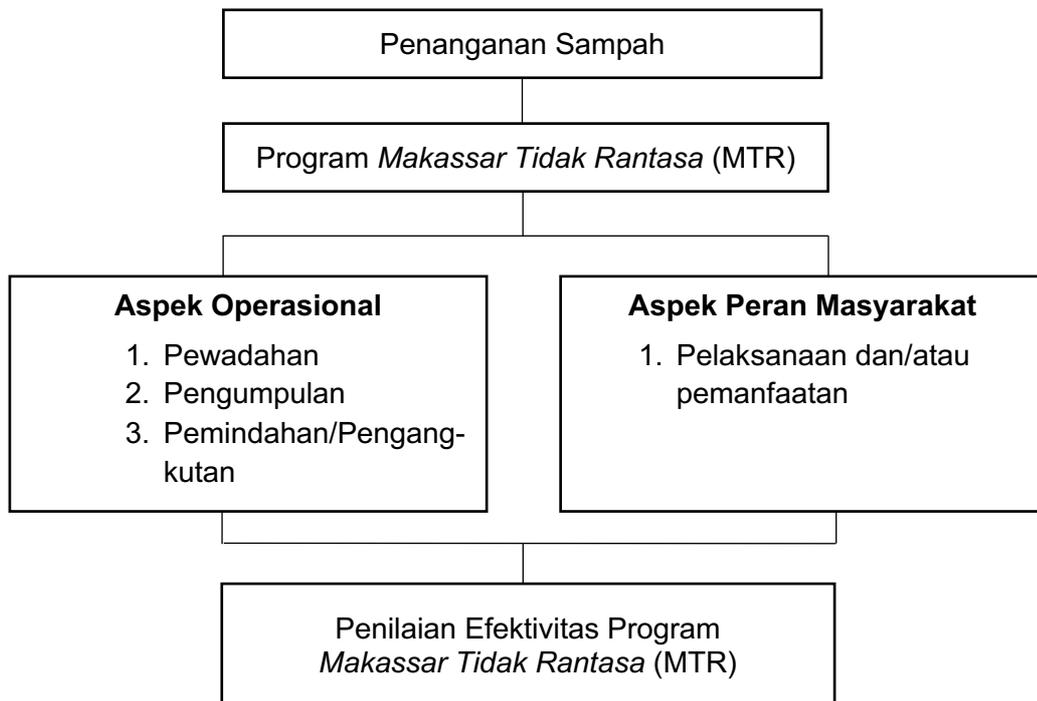
Haerul dkk. (2016) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program MTR di Kota Makassar”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program MTR sudah memberikan perubahan pola kehidupan masyarakat Kota Makassar Khususnya di Kecamatan Tamalate dengan adanya Program Bank Sampah, gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA), dan gerakan Lorong Garden (LONGGAR), namun perubahan itu belum dimaksimalkan. Rekomendasi dari penelitian ini diwajibkan kepada seluruh pegawai Kota Makassar menjadi nasabah Bank Sampah Unit dan gerakan LISA harus dibudayakan dimanapun kita

berada serta pemerintah diharapkan mengadakan perlombaan LOGGAR antar kelurahan atau kecamatan setiap 3 bulan sekali.

Ika Mariescha M. Tanro (2016) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Penanganan Sampah Perkotaan pada “Program *Makassar Tidak Rantasa*’ di Kecamatan Tamalate”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi penanganan sampah pada Program MTR di Kecamatan Tamalate belum baik. Berdasarkan hasil survei menunjukkan efektivitas pengelolaan sampah dari aspek operasional kurang baik, dari aspek kelembagaan dan peran serta masyarakat cukup baik. Arah penanganan persampahan di Kecamatan Tamalate diperlukan penambahan sarana dan prasarana, armada kebersihan atau tenaga personil, serta peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan penanganan sampah pada Program MTR.

H. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan tentang arah dan konsep dalam penelitian ini, maka dibuatlah kerangka pemikiran yang terdapat pada halaman berikutnya.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibuat peneliti, dapat terlihat bahwa konsep dan arah dari penelitian ini adalah menindak lanjuti efektivitas penanganan sampah melalui Program MTR dengan pendekatan aspek operasional dan juga peran masyarakat sebagai pelaku dalam pelaksanaan Program MTR.